

**PENERAPAN PENTA HELIX MODEL PADA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
SITUS RADIO MALABAR OLEH DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN
BANDUNG**

Asep R. Rukmana^{1*}, Rizal Abdul Hakim², Neneng Siti Maryam³

^{1,2,3}FISIP, Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

³Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Mandiri, Indonesia

Email Korespondensi: aseprukmana@unnur.ac.id

Email: rizalabdulhakim28@gmail.com; nenengsm70@gmail.com

ABSTRACT

Research conducted at the Cultural Heritage Site of Malabar Radio Station Bandung Regency, this is in line with lifestyle changes, urbanization, and technological developments often pose threats to the sustainability of existing Cultural Heritage Sites. The purpose of this study is to analyze how the management collaboration between the Bandung Regency government and related stakeholders regarding the management of the cultural heritage site of Malabar radio station. The theoretical model used as the basis of this research is the helix model with a penta helix strategy in the management of cultural heritage sites, which involves an active role in the form of cooperation from the government, business/private sector academics, the community and the mass media. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type of research, with the data collection technique being through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the management of the Malabar Radio Station Cultural Heritage Site has involved various parties with complementary roles. However, the main challenges lie in cross-sectoral coordination, policy consistency, and strengthening community institutions in the form of training, the formation of tourism-aware organizations, and long-term formal cooperation. Continuous collaboration between stakeholders is needed to make this site a model for the preservation and development of cultural heritage that is integrative, productive, and sustainable. The researcher suggested that the management of the Malabar Radio Site needs to be improved through cross-sectoral collaboration, community training, and sustainable preservation strategies. Improving facilities and digital promotion is also important to expand tourist attractions and visits.

Keywords: Helix model, Cultural heritage site management, Malabar radio station.

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan di Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar Kabupaten Bandung, hal ini sejalan dengan perubahan gaya hidup, urbanisasi, hingga perkembangan teknologi sering kali membawa ancaman bagi keberlangsungan Situs Cagar Budaya yang ada. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana kolaborasi pengelolaan antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan para pemangku kepentingan terkait mengenai pengelolaan situs cagar budaya stasiun radio Malabar. Model teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini yaitu model helix dengan strategi penta helix dalam pengelolaan situs cagar budaya, yang melibatkan peran aktif dalam bentuk kerjasama dari pemerintah, akademisi sektor usaha/swasta, masyarakat dan media massa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar telah melibatkan berbagai pihak dengan peran yang saling melengkapi. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi lintas sektor, konsistensi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

154

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



kebijakan, dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembentukan organisasi sadar wisata, serta kerja sama formal jangka panjang. Kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menjadikan situs ini sebagai model pelestarian dan pengembangan cagar budaya yang integratif, produktif, dan berkelanjutan. Peneliti memberikan saran Pengelolaan Situs Radio Malabar perlu ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor, pelatihan masyarakat, dan strategi pelestarian berkelanjutan. Peningkatan fasilitas serta promosi digital juga penting untuk memperluas daya tarik dan kunjungan wisatawan.

Kata kunci: Model helix, Pengelolaan situs cagar budaya, Stasiun radio malabar.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik unik yang mencerminkan identitas dan warisan budaya lokal. Kekayaan ini tidak hanya menjadi aset berharga bagi bangsa, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai suatu daerah. Cagar Budaya merupakan bukti dengan bentuk asli seperti benda yang membentuk sebuah bangunan, wilayah atau struktur yang dibangun oleh sekelompok orang dimasa lalu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sistem yang berupa pendataan secara registrasi guna mempertahankan dan menetapkan cagar budaya yang terus bertambah seiring berjalannya waktu dan menjadi situs warisan sehingga dapat mencerminkan kepribadian suatu bangsa yang kaya akan warisan dari leluhurnya untuk terus dirawat dan di lestarikan. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan rekapitulasi cagar budaya yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia:

Tantangan untuk melestarikan Cagar Budaya menjadi semakin besar di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang pesat. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, hingga perkembangan teknologi sering kali membawa ancaman bagi keberlangsungan Cagar Budaya yang ada. Dalam melestarikan Cagar Budaya tidak hanya berpusat pada peran pemerintah dalam membuat kebijakan guna mempertahankan kelestariannya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 4 menjelaskan Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi; Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Dalam perlindungan Cagar Budaya juga harus melibatkan Kerjasama dan kesadaran masyarakat lokal guna memastikan terjaganya Cagar Budaya yang dapat melindungi dari terjadinya kehilangan dan kerusakan. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan berbagai kebijakan untuk melestarikan, termasuk menetapkan regulasi perlindungan cagar budaya, mengalokasikan anggaran untuk restorasi dan perawatan situs bersejarah, serta mempromosikan budaya lokal di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat lokal, akademisi, hingga sektor swasta, dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan Cagar Budaya secara berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat dan sektor swasta upaya pelestarian tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga Cagar Budaya di wilayah mereka. Melalui sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, kekayaan sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Bandung dapat terus memberikan manfaat, tidak hanya sebagai identitas nasional tetapi juga sebagai sumber daya yang mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Kabupaten Bandung dikenal dengan kekayaan alam yang beragam, tidak hanya dengan kondisi geografis yang dingin serta banyak tempat-tempat kekinian yang enak untuk dijadikan tempat rekreasi

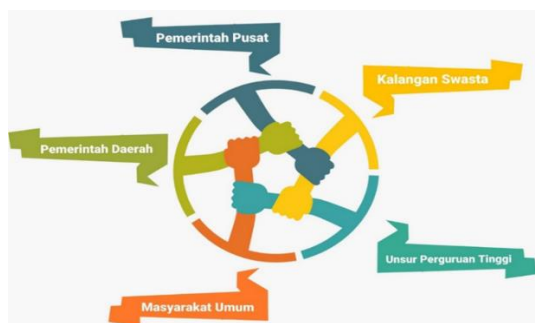
dan mepelas penat (*healing*), juga dikenal dengan banyaknya situs Cagar Budaya yang masih kokoh berdiri sampai saat ini seperti Makom Mahmud, Rumah Adat Cikondang, Bumi Alit Kabuyutan Batukarut, Radio Malabar (Gunung Puntang), bekas Pabrik Induk Pencelupan Majalaya (INPEMA), Masjid Agung Majalaya, Makam Boscha dan Rumah Boscha. Keberadaan Situs Cagar Budaya ini menjadi asset yang sangat berharga dalam menunjukkan nilai-nilai budaya terutama sejarah terbentuknya Situs Cagar Budaya tersebut. Dalam mempertahankan dan mengembangkan Cagar Budaya, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa warisan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung tetap terjaga dan terawat dengan sangat baik.

Stasiun Radio Malabar, pada masa penjajahan Belanda, menjadi simbol kemajuan Iptek dan kekuatan utama di Hindia Belanda. Pemilihan lokasi di Malabar karena memiliki lokasi strategis yang mampu memancarkan signal gelombang radio dengan kualitas yang baik. Pembangunan stasiun radio ini dipimpin oleh de Groot, seorang insinyur Belanda lulusan Jerman, dan diresmikan tahun 1923 oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock. Focus program Radio Malabar terletak pada komunikasi dan informasi khususnya berkaitan dengan kepentingan pemerintah Belanda yang ada di Den Haag dan Hindia Belanda sebagai koloni Belanda. Dengan demikian pada waktu itu stasiun radio ini memiliki peran sangat penting sebagai penghubung komunikasi antara Belanda dan Hindia Belanda.

Kejayaan Stasiun Radio Malabar meredup saat Perang Dunia II Ketika Jepang menduduki wilayah tersebut. Tentara Jepang memfungsikan stasiun radio ini sebagai basis propaganda Jepang dan sebagai alat komunikasi pemerintah Jepang di Hindia Belanda dengan pemerintah Jepang di Tokyo. Namun hal tersebut berakhir setelah Jepang kalah atas sekutu Amerika. Sempat pasukan Belanda berniat menduduki kembali wilayah mantan jajahannya. Namun, untuk mencegah hal tersebut para pejuang Revolusi Indonesia mengambil inisiatif untuk menghancurkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Belanda, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkannya kembali untuk kepentingan politik dan militer. Stasiun Malabar masih menjadi kenangan kemajuan teknologi komunikasi bagi orang Belanda, yang bahkan tahun 1948 masih diperingati. Kini stasiun Malabar sudah tidak beroperasi, namun meskipun merupakan warisan dari masa Kolonialisme Belanda, upaya pelestarian stasiun Malabar perlu dilakukan karena potensinya sebagai destinasi wisata di Jawa Barat yang kaya akan nilai sejarah.

Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan kelestarian cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah harus dapat memperhatikan keberadaannya seperti yang tercantum pada Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menjelaskan pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat di pertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif. Dalam proses pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya agar masih terjaga keberadaan dan eksistensinya terdapat pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menjelaskan pengembangan Cagar Budaya yaitu dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat. Dalam memastikan Cagar Budaya perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak pemangku kepentingan, seperti yang tergambar berikut ini:

Gambar 1: Pemangku Kepentingan Pelestarian Cagar Budaya



Sumber: kebudayaan.kemendikbud.go.id (2019)

Selama ini, pengelolaan Cagar Budaya Situs Radio Malabar di Kabupaten Bandung masih dirasakan kurang maksimal, hal ini terlihat dari memiliki permasalahan yang timbul diantaranya: 1) Kontribusi dari pemerintah melalui Dinas Budaya dan Pariwisata yang belum maksimal dalam melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya Situs Radio Malabar yang tidak hanya berfokus pada pendataan secara administratif akan tetapi harus memastikan masyarakat setempat yang berada di lingkungan Cagar Budaya tersebut merasakan dampak dan manfaatnya guna meningkatkan kesejahteraan, 2) Peran pihak swasta yang cenderung lebih banyak dalam memberikan kontribusi untuk pengelolaan Cagar Budaya Situs Radio Malabar. Pada pengelolannya tidak terlalu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang mengakibatkan dalam proses pelestariannya banyak peran dari masyarakat luar tanpa mengutamakan peran masyarakat local, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat lokal dalam menjaga, merawat serta memberikan inovasi terbaru terhadap pengelolaan Cagar Budaya Situs Radio Malabar guna melestarikan dan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati keindahan Situs Cagar Budaya Radio Malabar, 4) Minimnya kontribusi institusi pendidikan (akademisi) dalam membangun soft skill dan hard skill baik secara edukasi maupun pelatihan pada masyarakat sekitar Situs Radio Malabar agar lebih mampu memberdayakan potensi yang ada dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa kolaborasi antara beberapa stakeholder (pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat) dalam upaya memaksimalkan pengelolaan Situs Radio Malabar melalui Quadruple Helix Model oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bandung.

Model Helix pada dasarnya berasal dari konsep komunikasi pemangku kepentingan, Astuti dkk (2020) memberikan definisi “pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan atau proyek yang akan diselesaikan”. Jika dikaitkan dengan penelitian ini mengenai pengelolaan Cagar Budaya, maka dapat dikatakan pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam pengelolaan Cagar Budaya. Model Helix terbangun dari perkembangan beberapa konsep yaitu triple helix, quadra helix dan penta helix. Konsep pemangku kepentingan *triple helix*, *quadra helix* dan *penta helix* dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1: Pemangku Kepentingan Triple Helix, Quadruple Helix dan Penta Helix

<i>Triple-Helix</i>	<i>Quadruple-Helix</i>	<i>Penta-Helix</i>
Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah (Government)
Bisnis	Bisnis	Dunia Usaha (Business)
Akademisi	Akademisi	Akademisi (Academicial)
□	Organisasi non-pemerintah/Civil-Society	Organisasi non-pemerintah/Civil-Society
□	□	Media Massa (Mass-Media)

Sumber: Astuti dkk (2020:101), dimodifikasi oleh peneliti (2025).

Menurut Astuti dkk (2020) menjelaskan konsep *Triple Helix* yang dapat ditelusuri jejaknya sejak perang dunia kedua. Perang dunia kedua melahirkan konsep hubungan yang komprehensif antara ilmu pengetahuan (akademisi) sektor industry atau perdagangan (dunia usaha) dan sektor publik (pemerintah). Hubungan trilogi ini sangat jelas dan saling bergantung. Sektor publik yakni pemerintah menggunakan

basis pajak untuk menandai lembaga pengetahuan untuk meneliti teknologi dan produk inovatif, sektor bisnis memproduksi hasil penelitian dan inovasi tersebut dan akhirnya sektor public yakni pemerintah mendapatkan hasil melalui penarikan pajak.

Quadruple Helix merupakan berkembang menjadi empat pemangku kepentingan dengan ditambahkan kolaborasi dari non pemerintah dalam bentuk organisasi, lembaga maupun komunitas yang sengaja dibentuk dari masyarakat yang mempunyai kepentingan bersama untuk kesejahteraannya, serta sejalan dengan tujuan dari kolaborasi sebelumnya. Langkah terakhir adalah penta helix, menurut Sutreson, Lindmark dan Roos dalam Astuti dkk (2020) menjelaskan bahwa model penta helix sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multi pihak dimana pemangku kepentingan, mewakili berbagai kepentingan dalam satu lokasi.

Model penta helix menjadi pilihan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, karena didalam penerapan konsep ini terdapat kolaborasi yang sangat memungkinkan dalam mencapai tujuan pengelolaan Cagar Budaya yang maksimal. Penerapan konsep penta helix ini melibatkan pemangku kepentingan diantaranya: 1) Pemerintah; Peran Pemerintah sering dikaitkan sebagai regulator yaitu lembaga yang berwenang dalam mengatur dan menyiapkan arah tujuan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010). Berdasarkan teori tersebut, pemerintah diharuskan membuat kebijakan peraturan yang di dalamnya tidak hanya berfokus pada pendataan secara administrasi akan tetapi adanya peraturan yang mengharuskan serta memastikan masyarakat yang berada di lingkungan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar mampu bertanggung jawab dalam pengelolaan, serta harus selalu memastikan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat bekerjasama dengan baik guna menjaga dan memastikan keberlangsungan Cagar Budaya tersebut, 2) Dunia Usaha (*Business*); Menurut Carayannis dan Campbell (2012) menjelaskan “Dunia Usaha berfungsi sebagai pilar utama dalam menghasilkan dan mengaplikasikan inovasi yang diintegrasikan dengan akademisi, pemerintah, komunitas, dan mesia untuk mendukung pembangunan berbasis pengetahuan”. Sedangkan Indarti dan Langenberg (2018) mendefinisikan “Dalam model Penta Helix, dunia usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem inovasi melalui investasi, adopsi teknologi, dan kemitraan dengan sektor lain untuk meningkatkan daya saing ekonomi”. Peran dunia usaha dalam hal ini memiliki kepentingan dalam mendorong serta meningkatkan daya saing kebutuhan komersial, sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam proses pengelolaan Cagar Budaya secara materil, 3) Akademisi (*Academician*); Prawihatmi (2018) menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dihilirisasi melalui pengabdian kepada masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, usaha, dan masyarakat dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya Astuti dkk (2020) menyatakan bahwa praktisi akademisi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk pengembangan proyek/kebijakan. Keahlian dalam pengetahuan yang memiliki keterkaitan dengan proyek yang bersangkutan diantaranya seperti arsitek, insinyur, ilmuwan, deokter, dan paraktisi Kesehatan, ahli geografi pendidik maupun administrasi publik dari univeritas atau organisasi riset yang tertarik pada pengembangan proyek, 4) Organisasi Non Pemerintah atau Masyarakat Madani (*Non-Government Organization or Civil Society*); Astuti dkk (2020) memberikan pengertian “Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara suka rela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya”. Pada penelitian ini, organisasi non pemerintah dikaitkan dengan kontribusi dari masyarakat lokal yang tinggal di wilayah sekitar lingkungan Situs Cagar Budaya yang memiliki budaya, tradisi, nilai, dan sistem sosial yang khas, serta menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara bersama-sama khususnya dalam membantu pengelolaan Situs Cagar Budaya tersebut, yang berdampak pada pemanfaatan untuk kesejahteraan hidupnya. Masyarakat lokal umumnya memiliki hubungan erat dengan lingkungan tempat

tinggal mereka, sehingga mereka lebih mengetahui bagaimana kondisi secara langsung berdasarkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, 5) Media Massa (*Mass Media*); Irawan (2021) menekankan bahwa media massa berperan sebagai fasilitator dialog yang menyediakan platform diskusi publik. Peran ini memungkinkan terjadinya interaksi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di berbagai sektor, mendorong pemahaman bersama, serta memperkuat sinergi dalam mendukung inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Peran media massa terdiri dari kelompok atau individu dari semua media digital maupun non-digital yang memiliki peran krusial terhadap penyebaran segala bentuk informasi kepada masyarakat secara luas dengan jangkauan nasional maupun internasional.

METODE

Obyek penelitian ini adalah penerapan model helix dalam pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar oleh Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Bandung berdasarkan parameter pemangku kepentingan dari yang melihat sejauh mana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan media massa dalam pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar, dalam meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan dan menambah nilai komersial untuk kesejahteraan bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Deskriptif, Kualitatif metode ini cenderung menjelaskan permasalahan ditemukannya hambatan yang terjadi sesuai fakta-fakta di lapangan dengan menggambarkan keadaan secara objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memeriksa keabsahan data secara kualitatif, peneliti menggunakan strategi Triangulasi dengan melibatkan kombinasi antara wawancara untuk memperoleh informasi dari informan secara faktual dan nyata, observasi secara langsung ke lokasi penelitian dan dokumentasi sebagai bukti penting pelaksanaan penelitian.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pelestarian Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar dari berbagai perspektif pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha/swasta, masyarakat, dan media. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para narasumber dari masing-masing sektor, berikut adalah interpretasi peneliti terhadap parameter penelitian yang telah ditentukan.

1. Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memandang keberadaan Situs Stasiun Radio Malabar sebagai simbol munculnya peradaban di lingkungan setempat. Situs ini memiliki nilai sejarah tinggi dan dianggap sebagai representasi warisan budaya yang patut dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pelestarian jejak sejarah melalui situs fisik, seperti struktur bangunan atau benda peninggalan masa lalu.

Pemerintah telah menunjukkan perhatian melalui proses inventarisasi data terhadap objek yang diduga sebagai cagar budaya, dimulai dari laporan masyarakat. Tindak lanjut dari laporan ini adalah pengiriman tim ahli ke lapangan untuk melakukan kajian. Selanjutnya, hasil kajian menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk menetapkan status cagar budaya pada tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memiliki prosedur formal dan berjenjang dalam merespons temuan budaya baru. Dalam hal regulasi, pemerintah berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai dasar hukum utama. Undang-undang ini menetapkan lima kategori objek yang dapat diklasifikasikan sebagai cagar budaya. Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua objek otomatis ditetapkan sebagai cagar budaya, tetapi harus melalui prosedur klasifikasi dan penilaian terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan adanya kepastian hukum serta acuan normatif yang menjadi rujukan dalam proses pelestarian.

Dilihat berdasarkan sisi pembiayaan, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan kajian, termasuk honorarium untuk tim ahli, serta pembiayaan operasional juru pelihara. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan sumber daya manusia dan finansial untuk mendukung keberlangsungan pelestarian situs, meskipun skalanya masih terbatas pada aspek dasar konservasi. Strategi pengelolaan yang diadopsi saat ini masih bersifat promotif melalui penyelenggaraan festival budaya di sekitar situs. Namun, terdapat rencana jangka menengah seperti pembangunan museum serta upaya peningkatan status situs menjadi Cagar Budaya Nasional. Pemerintah Kabupaten Bandung juga menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti arahan dari BPK9 Jawa Barat, yang menjadi otoritas pengarah kebudayaan di tingkat provinsi. Hal ini mencerminkan bahwa ada upaya pemerintah untuk menaikkan derajat situs ini baik dari sisi administratif maupun nilai strategisnya.

2. Akademisi

Akademisi memandang pentingnya pendekatan multi-disiplin dalam pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar, termasuk bidang sejarah, kebudayaan, dan bisnis. Peran akademisi tidak hanya sebatas dalam kajian konservasi, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan soft skill dan hard skill. Keterlibatan akademisi diharapkan menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pemerintah daerah. Pemerintah dan akademisi harus bekerja sama dalam mengelola situs ini, dengan kajian akademis yang tidak hanya fokus pada pengelolaan fisik situs, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sekitar. Kajian ini mencakup berbagai bidang seperti cagar budaya, sejarah, dan bisnis, dengan tujuan untuk menciptakan kebijakan yang komprehensif.

Keterlibatan berbagai akademisi dengan kompetensi yang relevan akan memperkaya perspektif dan solusi dalam pengelolaan situs. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan situs ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi dari dunia akademik untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kajian pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar, terutama dalam hal keterampilan yang relevan dengan sektor pariwisata, seperti di bidang restoran, homestay, dan layanan pariwisata lainnya. Pendidikan formal dan nonformal, seperti pelatihan atau kursus, akan membantu masyarakat mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan situs sebagai objek wisata. Hal ini menunjukkan bahwa untuk keberlanjutan pariwisata yang berbasis pada cagar budaya, peningkatan kapasitas masyarakat sangat penting.

Sudut pandang akademisi, kunci utama dalam mempertahankan kolaborasi ini adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh bupati. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan dukungan yang berkelanjutan untuk pengelolaan situs. Optimisme dalam pengelolaan situs sebagai hasil kolaborasi yang baik diharapkan mampu mendorong keberhasilan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat bergantung pada kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi sinergi antar pihak terkait.

3. Sektor Usaha/Swasta

Pelaku usaha melihat potensi besar pada Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar, terutama dari segi sejarah yang belum optimal diangkat dalam konteks pariwisata modern. Pengembangan potensi ini disarankan melalui wahana keluarga seperti playground untuk menambah daya tarik dan memperluas segmentasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta melihat pentingnya diversifikasi atraksi wisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pihak pengelola sektor swasta juga menjelaskan terkait adanya pola kerjasama berjenjang antara pemilik lahan (pihak pertama), investor utama (pihak kedua), dan pelaku usaha atau pemilik modal (pihak ketiga). Pihak kedua memiliki kendali atas operasional dan manajemen. Model ini mencerminkan pendekatan investasi terstruktur, di mana sektor swasta memiliki pengaruh

signifikan dalam pengembangan kawasan wisata sambil tetap terikat pada perjanjian dengan pemilik lahan.

Keterlibatan dalam pengembangan usaha kreatif dan UMKM lokal terdapat sinergi antara sektor pariwisata dan sektor pertanian, terutama dalam pengembangan potensi kopi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan situs sebagai cagar budaya membuka peluang integrasi lintas sektor, memperkuat nilai ekonomi dari aspek budaya dan sumber daya lokal. Usaha wisata tidak hanya berfokus pada pengelolaan lokasi wisata, tetapi juga turut mendorong produktivitas ekonomi lokal berbasis pertanian.

Sektor swasta telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar, melalui pelatihan perhotelan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi (Universitas Telkom). Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta menyadari pentingnya peningkatan kualitas SDM lokal sebagai bagian dari strategi keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata budaya. Kegiatan pengabdian masyarakat akademik menjadi salah satu bentuk sinergi positif antara dunia usaha dan pendidikan.

4. Masyarakat

Keberadaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi. Wawancara menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengunjung berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan pedagang, tukang ojek, hingga petugas kebersihan. Hal ini menunjukkan bahwa situs tersebut berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal melalui aktivitas pariwisata.

Aktivitas wisata yang meningkat telah menciptakan berbagai peluang kerja bagi masyarakat, seperti membuka warung, menjadi pemandu wisata (tour guide), hingga ikut serta dalam pengelolaan kebersihan kawasan situs. Masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan yang sebelumnya tidak tersedia, menunjukkan adanya pergeseran peran masyarakat dari semata petani atau pedagang menjadi pelaku ekonomi wisata berbasis budaya.

Dari sudut pandang masyarakat, belum terdapat pelatihan khusus dari pihak pemerintah atau lembaga lain untuk masyarakat umum terkait pengelolaan situs. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh sektor swasta/usaha yang menyatakan adanya pelatihan untuk masyarakat sekitar, akan tetapi pelatihan hanya terbatas pada pegawai atau pengelola resmi serta sebagian kecil masyarakat terdekat sehingga penguatan untuk meningkatkan kemampuan softskill ataupun hardskill dalam pengelolaan Situs Cagar Budaya Radio Malabar.

Masyarakat secara langsung terlibat dalam pengelolaan situs, meskipun secara informal. Peran mereka meliputi kebersihan, pengelolaan teknis ringan, serta edukasi wisatawan melalui pemanduan. Ini membuktikan adanya kepedulian dan kesadaran kolektif dalam pelestarian situs, meskipun belum terorganisir dalam bentuk kelembagaan formal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar lebih siap berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata dan pelestarian budaya. Keterlibatan suatu kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar, hingga saat ini belum terbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan aktif dalam pengelolaan dan promosi situs. Namun, terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang fokus pada sektor pertanian kopi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada struktur kelembagaan sosial, belum secara khusus ditujukan untuk pariwisata, yang berpotensi menjadi peluang untuk pembentukan kelembagaan baru atau perluasan peran lembaga yang sudah ada.

5. Media Massa

Peran media seperti TVRI dalam pengelolaan dan promosi Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar masih bersifat sporadis dan belum terstruktur. Namun, terdapat potensi besar untuk

membangun narasi sejarah yang kuat melalui media massa, dengan catatan perlu adanya inisiatif proaktif dari pemerintah maupun lembaga terkait agar kerja sama ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak promosi serta edukasi yang luas kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Strategi promosi Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar dilakukan melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook. Strategi ini memperlihatkan pemanfaatan platform digital yang luas dan adaptif terhadap tren komunikasi modern, dengan keunggulan pada kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi. Selain itu, pada momen tertentu seperti musim liburan atau acara besar, media televisi dan jurnalis turut berkontribusi dalam promosi massal, terutama dengan menyoroti statistik kunjungan dan ketertarikan wisatawan.

TVRI menunjukkan keterbukaan terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama instansi pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Namun, kerja sama tersebut masih bersifat reaktif dan bergantung pada adanya surat permintaan resmi. Artinya, kolaborasi bersifat pasif dan belum terbangun secara strategis dan berkelanjutan. Sedangkan dari sisi peran media sosial meskipun belum ada bentuk kerja sama resmi dan berkelanjutan antara media dan pihak lain, kegiatan promosi biasanya terintegrasi dalam event-event khusus seperti festival atau kegiatan komunitas. Contoh konkret adalah kegiatan “BeautyClass” yang dipromosikan hingga ke sekolah-sekolah sebagai bentuk promosi tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada sistem kerja sama formal, bentuk kolaborasi ad-hoc sudah berjalan secara fungsional dan cukup efektif.

Tantangan utama dalam promosi Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar tidak dirasakan sebagai hambatan signifikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya jaringan informal kerja sama antara media dan pihak-pihak terkait seperti biro perjalanan (travel agent) yang turut membantu mempromosikan kawasan wisata Gunung Puntang secara keseluruhan termasuk situs cagar budaya dan perencanaan yang sangat matang dalam melaksanakan publikasi melalui pemberdayaan Sumber Daya Manusia secara maksimal. Ini menunjukkan adanya kolaborasi secara internal dan lintas sektor yang meskipun belum terstruktur secara formal, sudah berfungsi dalam mendukung promosi destinasi.

Interpretasi terhadap hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar telah melibatkan berbagai pihak dengan kontribusi yang beragam. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan regulasi teknis, minimnya pelatihan masyarakat, dan belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, namun inisiatif dari semua pihak memberikan sinyal positif terhadap pengelolaan dan pengembangan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar ini ke masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta hasil pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, akademisi, sektor usaha/swasta, masyarakat sekitar, serta media, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar di Gunung Puntang masih memiliki berbagai tantangan dan potensi besar yang dapat dikembangkan. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan dari penelitian ini:

Pemerintah daerah menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar. Proses inventarisasi dan penetapan status cagar budaya telah dilakukan dengan baik, meskipun pengelolaannya masih terbatas pada kajian dan pengelolaan administratif. Strategi pengelolaan yang ada lebih difokuskan pada kegiatan seperti festival dan rencana pembangunan museum untuk memperkenalkan situs ini kepada masyarakat luas. Ada harapan besar agar Situs Stasiun Radio Malabar diakui sebagai situs cagar budaya nasional, yang diharapkan akan membawa inovasi lebih lanjut dalam pengelolaannya.

Akademisi memainkan peran penting dalam mengembangkan kajian terkait Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar. Mereka turut serta dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan kolaborasi yang lebih mendalam antara pihak akademisi dan pemerintah untuk memastikan pengelolaan situs ini dapat mencakup aspek sejarah, budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara holistik. Pengembangan keterampilan masyarakat di bidang pariwisata dan usaha kreatif juga menjadi prioritas agar manfaat ekonomi dari situs ini dapat dirasakan lebih luas.

Sektor swasta memiliki peran penting dalam pengembangan wisata di sekitar Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar, terutama dalam hal investasi dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Kerjasama antara pihak pemilik lahan, investor, dan pelaku usaha memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien. Namun, tantangan yang ada adalah bagaimana sektor usaha dan swasta dapat melibatkan lebih banyak masyarakat lokal dalam proses pengembangan ini. Usaha pariwisata harus dapat memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian kopi, yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah.

Keberadaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat sekitar, baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Masyarakat lokal, terutama pedagang dan petani, merasakan manfaat dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke situs ini. Pendapatan dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata mengalami peningkatan. Namun, pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif dalam pengelolaan situs ini masih terbatas, dan perlu ditingkatkan oleh pemerintah atau pihak terkait.

Promosi mengenai keberadaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar dilakukan melalui berbagai saluran media sosial dan kerjasama dengan media massa. Media (TVRI) memiliki peran penting dalam promosi dan dokumentasi situs, meski keterlibatan masih terbatas pada permintaan tertentu dan belum ada program promosi berkelanjutan. Media menyadari pentingnya situs ini untuk dikenalkan pada generasi muda, dan siap menjalin kerja sama lebih luas jika didukung oleh kebijakan pemerintah. Namun, tantangan besar adalah bagaimana meningkatkan kualitas promosi dan memperluas jangkauan informasi agar lebih banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung. Keterlibatan media dalam mempromosikan situs ini perlu diperkuat, terutama dengan adanya acara-acara khusus yang dapat menarik perhatian publik.

Pengelolaan Situs Cagar Budaya Stasiun Radio Malabar telah melibatkan berbagai pihak dengan peran yang saling melengkapi. Namun, tantangan utama terletak pada koordinasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembentukan organisasi sadar wisata, serta kerja sama formal jangka panjang. Kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menjadikan situs ini sebagai model pelestarian dan pengembangan cagar budaya yang integratif, produktif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anggara, Sahya, (2016) Ilmu Administrasi Publik, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Astuti, Retno Sunu. WARSONO, Hardi. RACHIM, Abd.(2020) Collaborative Governance : Dalam Perspektif Administrasi Publik, Semarang, Prohram Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Carayannis, Elias G. Campbell, David F.J. (2012) Mode 3 Knowledge Production In Quadruple Helix Innovation System, Springer New York, NY.
- Hidayat dan Asep R. Rukmana (2021) The Quadruple Helix Strategy for Tourism Development: Case Study at Mekar Rahayu Village, Marga Asih District, Bandung Regency, EDUCARE: International Journal for Educational Studies, Volume 13(2), February 2021.
- Labolo, Muhadam.(2013) Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori konsep, dan pengelolaannya, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy.J.(2016) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosda Karya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

163

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

- _____, (2019) Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung, PT Remaja Rosda Karya (Edisi Revisi).
- Pasolong, Harbani, (2019) Teori Administrasi Publik, Bandung, Alfabeta.
- Peraturan Bupati Bandung Bandung No. 26 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
- Rasyid, Muhammad Ryaas.(2007) Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya.
- Ranjabar, Jacobus,(2016) Pengantar Ilmu Politik,: Dari Ilmupolitik Sampai Politik Di Era Globalisasi, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. (2019) Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Suhardono, Edy.(2013) Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Bandung, Garamedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Bandung No. 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.